

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi selama dua dekade terakhir telah menciptakan perubahan besar dalam pola penyebaran dan konsumsi informasi di Indonesia. Media digital dan internet menjadi faktor penentu dalam pergeseran pola konsumsi media, di mana masyarakat semakin bergantung pada platform berita daring untuk mendapatkan informasi. Peningkatan akses internet, penetrasi *smartphone*, dan karakter media digital yang mampu memperbarui informasi secara cepat mendorong publik menjadikan media *online* sebagai rujukan utama. Kondisi ini menjadikan media *online* tidak hanya sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai aktor sosial yang berperan penting dalam membentuk opini publik, persepsi masyarakat, dan konstruksi makna atas berbagai isu yang berkembang. Seiring dengan itu, kompleksitas isu-isu nasional yang membutuhkan perhatian publik membuat media memainkan peran yang semakin strategis. Salah satu isu yang paling dominan dibicarakan publik pada tahun 2025 adalah isu energi. Energi merupakan sektor fundamental yang menopang kehidupan masyarakat, industri, hingga pembangunan nasional. Ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil, dinamika harga minyak dunia, upaya transisi energi menuju energi baru terbarukan (EBT), hingga tantangan dalam menjaga ketahanan energi nasional membuat isu ini mendapatkan sorotan besar. Tidak hanya itu, kebijakan energi juga berkaitan dengan keberlangsungan hidup masyarakat sehari-hari seperti harga listrik, harga BBM, penggunaan gas rumah tangga, hingga akses terhadap energi di daerah terpencil.

Memasuki tahun 2025 sektor energi memasuki fase baru setelah dilantikannya Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sebagai pejabat baru, kebijakan yang diterapkan di bawah kepemimpinannya menjadi pusat perhatian media dan masyarakat. Bahlil membawa sejumlah agenda

seperti percepatan EBT, optimalisasi lifting minyak dan gas, pembenahan tata kelola energi, hingga kebijakan penyesuaian subsidi energi. Seluruh kebijakan tersebut tidak terlepas dari dinamika ekonomi global, tuntutan pembangunan berkelanjutan, dan target nasional menuju *net-zero emission* pada 2060 (Nasir & Bengi, 2024). Perubahan dalam kebijakan energi tersebut memicu diskusi publik yang luas. Masyarakat ingin mengetahui arah kebijakan pemerintah, dampaknya terhadap harga energi, implikasinya terhadap stabilitas ekonomi, dan potensi keuntungan bagi masyarakat. Hal ini membuat pemberitaan media menjadi rujukan utama bagi publik untuk memahami dinamika tersebut. Media dalam hal ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membingkai isu berdasarkan perspektif redaksional dan kebijakan editorial masing-masing.

Menurut (McQuail, 2011), media memiliki kekuatan dalam membentuk realitas sosial masyarakat melalui proses seleksi dan penonjolan pesan (*selection and salience*). Media menentukan aspek mana yang ditonjolkan, mana yang disederhanakan, serta perspektif apa yang ingin ditanamkan kepada publik. Kerangka ini menunjukkan bahwa pemberitaan media tidak pernah sepenuhnya netral. Kehadiran interpretasi, pilihan kata, sudut pandang, dan struktur narasi membuat realitas yang disajikan media merupakan konstruksi yang dipengaruhi oleh nilai dan kepentingan tertentu. Dalam konteks ini, konsep *framing* menjadi kunci dalam memahami bagaimana media membentuk realitas. *Framing* merupakan proses di mana media memilih bagian tertentu dari sebuah peristiwa untuk diberi penekanan sehingga membentuk cara pembaca memahami isu tersebut. (Entman, 1993) menyatakan bahwa *framing* bekerja melalui empat perangkat utama: *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgment*, dan *treatment recommendation*. Melalui perangkat ini, media dapat menentukan apa yang dianggap sebagai masalah, siapa penyebabnya, bagaimana isu tersebut dinilai, dan solusi apa yang ditawarkan atau diasumsikan.

Konsep *framing* menjadi sangat relevan ketika digunakan untuk menganalisis pemberitaan kebijakan energi. Kebijakan energi sering kali memiliki dimensi teknis yang kompleks dan memerlukan interpretasi, sehingga media

memiliki peran besar dalam menyederhanakan informasi kepada masyarakat. Dalam penyederhanaan tersebut, media secara tidak langsung membentuk cara publik menilai kebijakan. Media yang menonjolkan keberhasilan pemerintah dapat menghasilkan penerimaan publik yang lebih positif. Sebaliknya, media yang menonjolkan kelemahan, tantangan, dan kritik dapat mendorong publik untuk mempertanyakan efektivitas kebijakan energi. Pra-riset yang dilakukan peneliti menunjukkan adanya perbedaan *framing* yang signifikan antara ANTARA News dan Tempo.co dalam memberitakan kebijakan energi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. ANTARA News, yang merupakan kantor berita pemerintah, menyampaikan berita dengan bahasa yang lebih formal dan berorientasi pada penyampaian informasi resmi. ANTARA cenderung menonjolkan keberhasilan pemerintah seperti pencapaian lifting minyak, pembangunan infrastruktur energi, dan pencapaian target energi. ANTARA jarang memunculkan kritik atau pandangan oposisi terhadap kebijakan energi. Berbeda dengan ANTARA, Tempo.co sebagai media independen lebih banyak memberikan ruang bagi kritik, analisis mendalam, dan pandangan alternatif. Tempo.co menyoroti dampak jangka panjang kebijakan energi, keefektifan strategi transisi energi pemerintah, dan kritik dari pengamat energi atau akademisi. Tempo.co juga sering mengaitkan kebijakan energi dengan isu lain seperti lingkungan, ekonomi politik, dan tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, perbedaan orientasi redaksional menghasilkan *framing* yang berbeda antara kedua media tersebut.

Pemilihan ANTARA News dan Tempo.co dalam penelitian ini tidak semata didasarkan pada anggapan umum bahwa satu media berafiliasi dengan pemerintah dan satu lainnya bersifat independen, melainkan didukung oleh bukti historis dan struktural yang lebih konkret. ANTARA secara resmi berbentuk Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA, yakni badan usaha milik negara yang sepenuhnya dimiliki Pemerintah Indonesia, sekaligus berfungsi sebagai kantor berita (*wire service*) yang produk jurnalistiknya digunakan dan disalurkan ulang oleh berbagai media daerah maupun nasional lain di Indonesia, sehingga framing yang dibangunnya berpotensi memiliki daya sebar yang lebih luas

ketimbang media pada umumnya. Sebaliknya, independensi Tempo bukan sekadar citra, melainkan telah teruji langsung melalui konfrontasi dengan kekuasaan negara: pada 21 Juni 1994, Majalah Tempo dibredel oleh pemerintahan Orde Baru bersama Editor dan tabloid Detik akibat pemberitaan kritis mengenai dugaan penyimpangan dalam pembelian kapal perang bekas Jerman Timur, sebelum akhirnya kembali terbit pascareformasi 1998. Peristiwa pembredelan tersebut bahkan turut mendorong lahirnya Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebagai respons atas sikap organisasi pers yang dinilai tidak melindungi kebebasan pers pada masa itu. Dengan demikian, pemilihan kedua media ini sejalan dengan strategi *extreme case sampling* dalam penelitian kualitatif, yaitu memilih dua kasus yang berada pada titik paling ekstrem dari suatu spektrum dalam hal ini spektrum orientasi kelembagaan media terhadap kekuasaan negara agar perbedaan pola *framing* yang hendak diteliti dapat teramati secara maksimal dan kontras.

Contoh pemberitaan yang dianalisis dalam pra-riset menunjukkan jelas bahwa ANTARA News mengemas peningkatan lifting minyak sebagai capaian positif yang menunjukkan kinerja pemerintah yang baik. Sementara Tempo.co menekankan bahwa meskipun ada peningkatan lifting, masih terdapat persoalan mendasar dalam konsiderasi kebijakan energi jangka panjang seperti ketergantungan pada energi fosil, masih rendahnya kontribusi EBT, dan ketidakpastian arah kebijakan dalam memenuhi target *net-zero emission*. Perbedaan penekanan ini menunjukkan perbedaan *framing* yang muncul dari kedua media.

Peningkatan intensitas pemberitaan mengenai isu energi pada awal 2025 juga turut memengaruhi persepsi publik. Data percakapan publik di media sosial menunjukkan bahwa masyarakat banyak mendiskusikan isu energi seperti harga BBM, subsidi listrik, kebijakan EBT, dan transisi energi. Hal ini menunjukkan bahwa energi merupakan isu yang sensitif dan berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, *framing* media berpotensi sangat memengaruhi opini publik, sehingga analisis *framing* menjadi sangat penting dilakukan. Dari sisi akademik, penelitian terdahulu mengenai *framing* media di Indonesia sudah banyak dilakukan, namun sebagian besar berfokus pada isu politik,

representasi tokoh publik, bencana alam, maupun isu sosial tertentu. Penelitian mengenai *framing* kebijakan energi secara khusus masih sangat terbatas. Sebagian penelitian energi bahkan lebih banyak menggunakan pendekatan kebijakan publik, analisis ekonomi, atau isu lingkungan, bukan analisis *framing* media. Selain itu, penelitian yang secara khusus membandingkan *framing* antara media pemerintah dan media independen dalam isu energi juga belum ditemukan, sehingga terdapat celah penelitian yang signifikan.

Selain itu, hasil penelitian terdahulu turut memperkuat urgensi kajian *framing* dalam pemberitaan media di Indonesia. (Anggoro et al., 2024) dalam penelitiannya mengenai *female representation* pada pemberitaan calon presiden 2024 di Republika.com dan Sindonews.com menemukan bahwa perbedaan karakter media dapat menghasilkan konstruksi makna yang berbeda meskipun isu yang dibahas sama. Republika.com cenderung menggunakan *framing* yang lebih moderat dan informatif, sementara Sindonews.com lebih menonjolkan aspek konflik dan dinamika politik. Penelitian tersebut menekankan bahwa media memiliki kecenderungan tertentu dalam menentukan fokus pemberitaan, memilih aktor, serta membangun narasi yang ingin disampaikan kepada publik. Temuan ini relevan dengan penelitian yang tengah dilakukan karena menunjukkan bahwa orientasi media sangat menentukan bagaimana isu kebijakan publik dikonstruksi, termasuk dalam isu energi.

Penelitian lain oleh (Anindita et al., 2022) mengenai *framing* pemberitaan Menteri Sosial Tri Rismaharini pada beberapa media *online* menunjukkan bahwa media dengan orientasi kritis lebih sering menyoroti kontroversi, potensi permasalahan kebijakan, serta respons publik yang beragam. Sebaliknya, media dengan citra netral atau dekat dengan pemerintah cenderung lebih fokus pada aspek informatif dan pencapaian program. Hasil penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa *framing* tidak hanya dipengaruhi oleh peristiwa yang diberitakan, tetapi juga oleh kebijakan redaksi, kepentingan institusi, dan posisi media dalam politik nasional. Dalam konteks kebijakan energi, temuan ini relevan untuk menjelaskan bagaimana ANTARA News dan Tempo.co membingkai isu terkait kebijakan

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan cara yang berbeda. Kedua penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa *framing* media dipengaruhi oleh orientasi redaksional dan struktur kepentingan masing-masing media. Namun, tidak ada dari penelitian tersebut yang secara khusus mengkaji isu energi, terlebih pada masa kepemimpinan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM tahun 2025. Secara khusus, belum ada penelitian yang membandingkan pemberitaan antara media pemerintah dan media independen terkait kebijakan energi menggunakan perangkat *framing* Robert Entman. Inilah yang menjadi celah penelitian (*research gap*) yang mendorong perlunya kajian mendalam agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana isu energi dikonstruksi di ruang pemberitaan digital.

Kebaruan pada penelitian ini terletak pada beberapa aspek. Pertama, penelitian ini fokus pada isu kebijakan energi tahun 2025 yang merupakan isu kontemporer dengan dinamika pemberitaan tinggi. Kedua, penelitian ini menggunakan model *framing* Entman yang memberikan struktur analisis yang jelas dan komprehensif. Ketiga, penelitian ini membandingkan dua media dengan orientasi redaksional berbeda, yaitu ANTARA News dan Tempo.co, sehingga memberikan gambaran tentang bagaimana karakter media memengaruhi konstruksi makna. Keempat, penelitian ini mengangkat isu energi yang berkaitan erat dengan kebutuhan dasar masyarakat dan pembangunan nasional sehingga analisis *framing* memiliki nilai strategis. Urgensi penelitian ini tidak hanya terletak pada pentingnya isu energi, tetapi juga pada peran media sebagai pembentuk realitas publik. Informasi yang diterima masyarakat sangat bergantung pada bagaimana media membingkai suatu isu. Dalam konteks kebijakan energi yang kompleks dan memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, pemahaman terhadap *framing* media menjadi sangat penting agar masyarakat dapat mengembangkan literasi media yang lebih baik dan mampu memahami konteks kebijakan secara kritis.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana *Framing* Pemberitaan Kebijakan Energi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Di Antara News Dan Tempo.Co berdasarkan perangkat *framing* Robert Entman ?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui *Framing* Pemberitaan Kebijakan Energi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Di Antara News Dan Tempo.Co berdasarkan perangkat *framing* Robert Entman

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan kajian komunikasi massa, khususnya dalam studi *framing* media menggunakan model analisis Robert Entman.
2. Menambah referensi akademik terkait analisis *framing* pada isu kebijakan energi yang masih minim diteliti di Indonesia.
3. Memperkuat pemahaman mengenai perbedaan konstruksi berita antara media pemerintah dan media independen dalam isu-isu strategis nasional.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, dalam memahami bagaimana kebijakan energi dikomunikasikan dan diterima publik melalui berbagai media.
2. Menjadi masukan bagi praktisi media untuk meningkatkan kualitas pemberitaan, terutama dalam isu-isu strategis yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Memberikan informasi bagi masyarakat mengenai pentingnya membaca berita secara kritis dan memahami potensi *framing* dalam pemberitaan media *online*.